



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYATUAN ATAP PENGADILAN PAJAK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa aspek organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak yang selama ini belum berada di bawah pengelolaan Mahkamah Agung, dipandang berpotensi mengganggu independensi pengadilan pajak, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan independensi yang lebih kuat bagi pengadilan pajak, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak dipindahkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selambat-lambatnya pada 31 Desember 2026;
- c. bahwa untuk memastikan kelancaran pemindahan pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak, perlu dibentuk sebuah kelompok kerja untuk menyusun rencana yang komprehensif untuk menjadi pedoman dalam proses peralihan; dan
- d. bahwa nama-nama yang disebutkan dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk menyusun rencana kerja pemindahan pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak yang lengkap dan komprehensif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENYATUAN ATAP PENGADILAN PAJAK.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak.

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Penasihat : Ketua Mahkamah Agung RI

Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Ketua : Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Wakil Ketua I : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)

Wakil Ketua II : Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)

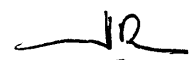
Sekretaris : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi (BUA), MA RI

Wakil Koordinator : Astriyani, S.H., MPPM. (Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial)

Anggota : 1. Septia Putri Riko, S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
2. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha Negara, Biro Kesekretariatan Pimpinan, BUA, MA RI

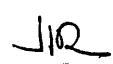


Fungsi Yudisial

- Koordinator : Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. (Ketua Kelompok Kerja Kamar Tata Usaha Negara/Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
- Anggota : 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Pajak
4. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
5. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak
6. Sekretaris Pengadilan Pajak
7. Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M. (Hakim Pengadilan Pajak)
8. Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H. (Staf Khusus Ketua Muda Tata Usaha Negara)
9. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
10. Dr. Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
11. A. Tirta Irawan, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
12. M. Tanzil Aziezi, S.H. (Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan)

Fungsi Penataan Organisasi dan Tata Kerja

- Koordinator : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, BUA, MA RI
2. Ketua Pengadilan Pajak
3. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
4. Junaidi Eko Widodo, Ak., S.H., M.P.P. (Hakim Pengadilan Pajak)
5. Sekretaris Pengadilan Pajak
6. Aditya Agung Priyo Nugroho, S.E., M.IDS. (Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak)



7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi, BUA, MA RI
8. Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H. (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI)
9. Andhy Martuaraja, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BUA, MA RI)
10. Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Staf Khusus Ketua MA RI)
11. Arsil (Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan)

Fungsi Penataan Sumber Daya Manusia

- Koordinator : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI
- Anggota :
 1. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara MA RI
 2. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak
 3. Kepala Biro Kepegawaian, BUA, MA RI
 4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BUA, MA RI
 5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BUA, MA RI
 6. Sekretaris Pengadilan Pajak
 7. Anang Bagus Giarto, S.E., M.M. (Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak)
 8. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian, BUA, MA RI
 9. Dr. H. Maftuh Effendi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
 10. Mohamad Yusup, S.H. (Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
 11. Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A. (Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)



Fungsi Penataan Pengelolaan Anggaran dan Keuangan

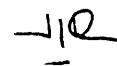
Koordinator : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan, BUA, MA RI
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, BUA, MA RI
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, MA RI
4. Sekretaris Pengadilan Pajak
5. Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan, BUA, MA RI
6. Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi, Biro Keuangan, BUA, MA RI
7. Kepala Bagian Perencanaan Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi, BUA, MA RI
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak
9. Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., M.Ak. (Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan MA RI)

Fungsi Penataan Pengelolaan Aset serta Sarana dan Prasarana

Koordinator : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Kepala Biro Perlengkapan, BUA, MA RI
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, BUA, MA RI
3. Kepala Biro Keuangan, BUA, MA RI
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, MA RI
5. Ketua Pengadilan Pajak
6. Sekretaris Pengadilan Pajak
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak
8. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I, Biro Perlengkapan, BUA, MA RI



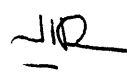
Fungsi Penataan dan Pengelolaan Informasi serta Penerapan Teknologi Informasi

Koordinator : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BUA, MA RI
2. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
3. Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Pengadilan Pajak
4. Kepala Bagian Pengembangan Sarana Informatika, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BUA, MA RI
5. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BUA, MA RI
6. Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Pusat Data Kepaniteraan, Mahkamah Agung RI)
7. Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
8. Ferdinand Rosco Silitonga, S.Kom., M.H. (Pranata Peradilan Ahli Muda Kepaniteraan, MA RI)

KETIGA : Menetapkan tugas Kelompok Kerja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. Menyusun kertas kerja tentang pemindahan pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia secara lengkap dan komprehensif.
2. Mempersiapkan rancangan kebijakan yang dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya pemindahan pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia secara lancar dan efektif.
3. Melaksanakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal Mahkamah Agung untuk memastikan terlaksananya proses pemindahan pengelolaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung secara mulus dan efektif.
4. Menyusun laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan pada akhir pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.



- KEEMPAT : Menetapkan segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2024

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan.